



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI**

**BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN  
INVESTASI**

---

Rapat ke	: 6 ( <i>enam</i> )
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero)
Hari, Tanggal	: Selasa, 25 Mei 2021
Pukul	: 16.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P, Wakil Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmi, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai evaluasi kinerja perusahaan
Hadir	: 1. .... orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT. PLN (Persero).

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero), pada pukul 17.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 25 Mei 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT PLN (Persero) terkait transformasi perusahaan dan kinerja perusahaan pada tahun 2020 yang berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,99 Triliun atau naik sebesar 38,6% dibandingkan dengan tahun 2019 di tengah Pandemi Covid-19.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam fleksibilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari PMN sehingga program elektrifikasi terealisasi di daerah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil).
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi PT PLN (Persero) terkait konversi energi fosil PLTD menjadi energi yang terbarukan.
4. Komisi VI DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk selalu melakukan inovasi-inovasi termasuk penerapan digitalisasi dalam rangka meningkatkan tatakelola dan efisiensi beban usaha perusahaan.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk merealisasikan pelaksanaan anggaran secara transparan, tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### Catatan:

- Program Elektrifikasi dan RUPTL untuk dibahas lebih lanjut dalam Panja BUMN Energi.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.20 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,



GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.A.R.

A-327